

SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG PINANG I
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN
ILIR**



**HUMAI
07021181320040**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

SKRIPSI

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG PINANG I KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



**HUMAI
07021181320040**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNGPINANG I KECAMATAN
TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI


Oleh:

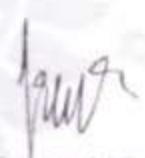
HUMAIDI
07021181320040

Indralaya, Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dadang Hikmah Purnama, M Hum
NIP 196507121993031003


Safira Seraida, M Sog
NIP 198209112006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Muhammad Sobri, M.Si
NIP 196311061990031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG PINANG 1 KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR" telah disemmarkan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Sriwijaya pada tanggal 17 Desember 2020.

Indralaya, Desember 2020

Ketua

Dr. Dadang H. Purnama, M.Hum
NIP. 196507121993031003

Anggota

1. Safira Soraida, M Sos
NIP. 198209112006042001

2. Drs. Tri Agus Susanto, MS
NIP. 19580825 1982031003

3. Gita Isyanawulan, S Sos, MA
NIP. 198611272015042003



Ketua Jurusan Sosiologi

Muhammad Sobri, M. Si
NIP. 1960031001

Dr. Yunndyawati, S. Sos, M Si
NIP. 197506032000032001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUMALDI
NIM : 0702181320040
Jurusan : SOSIOLOGI
Konsentrasi : PERENCANAAN SOSIAL
Judul Skripsi : PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG PINANG 1 KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILLIR
Alamat : Jalan Pasirah Kiri, Dusun 1, RT/RW 01, Desa Tanjung Pinang 1, Kecamatan - Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir
No.HP : 0813 - 7908 - 2196

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya,.....^{Desember}.....2020
Yang buat pernyataan,



HUMALDI
NIM - 0702181320040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Berilmu itu dibagi, berakhlak itu dijalani”

-Humaidi

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- *Kepada Orang tua, teman-teman saya*
- *Kepada seluruh Dosen dan Staff FISIP UNSRI*
- *Teman-teman Sosiologi Angkatan 2013*

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG
PINANG I KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN
OGAN ILIR**

Abstrak

Humaidi

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa di Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu masyarakat kurang aktif ikut berpartisipasi dan juga pemerintah desa yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitiannya adalah peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah lurah, perangkat kelurahan, dan masyarakat Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu. Pengumpulan data terdiri atas data primer yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangandan data sekunder yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data secara kualitatif untuk menggambarkan berdasarkan data pada hasil penelitian penulis mengklasifikasikan peran pemerintah Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang mampu. Hal ini terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang desa setiap tahunnya menurun.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Masyarakat, Partisipasi, Musrenbang

Dosen Pembimbing I

Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP. 196507121993031003

Dosen Pembimbing II

Safira Soraida, S.Sos, M.Sos
NIP. 198202112006042001

**Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Dr. Yunindyawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197506032000032001

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG
PINANG I KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN
OGAN ILIR**

Abstract

Humaidi

The problem in this research is the lack of community participation in the development of the village in Tanjung Pinang I Village, Tanjung Batu District, the coral community actively participates and also the village government does not socialize with the community so that the lack of which is used is a qualitative research method. The focus of his research is the role of the village government in increasing community participation in Tanjung Pinang I Village, Tanjung Batu District. The informants who were the target of this research were the village heads, village officials, and the people of Tanjung Pinang I Village, Tanjung Batu District. Data collection consists of primary data that is directly collected at the time of conducting research in the field and secondary data which is the result of collecting people or agencies in the form of publications, reports, documents, and other books related to this research. Qualitative data analysis to describe based on classifying the role of the government of Tanjung Pinang I Village, Tanjung Batu District shows that the government is less capable. It can be seen that the level of community participation in village musrenbang activities decreases every year. participation. Methods of data on the results of the author's research

Keywords: The Role of Government, Community, Prticipation, Musrenbang

Advisor I

Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP. 196507121993031003

Advisor II

Safira Soraida, S.Sos, M.Sos
NIP. 198202112006042001

**Head of Sociology Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University**

Dr. Yunindyawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197506032000032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat kasih dan ridhonya peneliti mendapatkan kemudahan, pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”

Penelitian ini hanyalah merupakan bagian kecil dari rangkaian proses panjang yang peneliti lalui untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana S-1 dalam bidang Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulisan penelitian tidak lepas dari bimbingan, arahan serta bantuan dalam berbagai bentuk dari berbagai pihak sehingga proses penyelesaian penelitian ini dapat di lalui dengan baik. Karenanya peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Kedua orang tua saya yang telah memberikan nasihat, semangat, dukungan beserta doa yang tiada henti. Semoga Tuhan memberikan berkah yang terbaik buat bapak dan ibu.
4. Yth. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
5. Yth. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi dan sekaligus Pembimbing Penelitian II yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Yth. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasihat dan arahan selama perkuliahan.
7. Yth. Bapak **Dr. Dadang H Purnama** selaku Pembimbing Penelitian I yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam segala bentuk dan ilmu yang berikan.
9. Kepada rekan-rekan angkatan Sosiologi 2013 terimakasih telah menghiiasi hari demi hari selama perkuliahan. Saya bersyukur telah menjadi bagian dari hidup kalian, semoga kelak kita bisa mencapai cita-cita untuk hidup yang lebih baik.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada pihak yang tidak disebutkan penulis mohon maaf. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebajikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amin.

Indralaya, Desember 2020

Peneliti

HUMAIDI
NIM. 07021181320040

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.3.1 Tujuan umum.....	7
1.3.2 Tujuan khusus.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
TEORITIK	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Pemikiran	19
2.2.1 Peranan	19
2.2.2 Peran Pemerintah Desa.....	22
2.2.3 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Musrenbang	25
2.2.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	28
2.2.5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes).....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Strategi Penelitian.....	34

3.4 Fokus Penelitian	34
3.5 Jenis dan Sumber Data	35
3.6 Penentuan Informan	36
3.7 Peranan Penelitian	37
3.8 Unit Analisis Data	38
3.9 Teknik Pengumpulan Data	38
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	40
3.11 Teknik Analisis Data	42
3.13 Sistematika Penulisan	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
4.1 Gambaran umum Desa Tanjung Pinang I	45
4.1.1 Letak geografis dan wilayah Desa Tanjung Pinang I	45
4.1.2 Administratif.....	46
4.2 Sosial Budaya Desa Tanjung Pinang I	47
4.3 Daftar Industri di Desa Tanjung Pinang I.....	47
4.4 Gambaran umum sarana dan prasarana	48
Fasilitas Umum.....	49
4.5 Gambaran Umum Informan	51
BAB V PEMBAHASAN.....	55
5.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).....	55
5.1.1 Pelaksanaan Musrenbang di Desa Tanjung Pinang I	55
5.1.2 Keterlibatan Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Tanjung Pinang I	59
5.2 Peran Pemerintah Desa.....	61
5.2.1 Mensosialisasikan Musrenbang Desa	61
5.2.2 Memberikan Dukungan Dari Segi Pembiayaan	62
5.2.3 Menampung dan Menyalurkan Usulan Masyarakat Desa.....	63
5.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Musrenbang Desa.....	68
5.4 Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi .	74
5.4.1 Anggaran Musrenbang Desa Tanjung Pinang I.....	75
5.4.2 Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Pinang I.....	76
5.4.3 Ekonomi	77
5.4.4 Tingkat Kesadaran Masyarakat	78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	81
6.1 Kesimpulan.....	81
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Musyawarah.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	35
Tabel 4. 1 Informasi Geografis Desa Tanjung Pinang I.....	45
Tabel 4. 2 Data Penduduk Desa Tanjung Pinang I, 2018.....	46
Tabel 4. 3 Orbitasi Desa Tanjung Pinang I	46
Tabel 4. 4 Daftar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Desa Tanjung Pinang I	49
Tabel 4. 5 Fasilitas Sosial.....	49
Tabel 4. 6 Keadaan Informan	53
Tabel 4. 7 Keadaan Informan Kunci.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan masyarakat (Soekanto, 2012: 358).

Pembangunan pedesaan yang selama ini terpisahkan dari pembangunan perkotaan dan cenderung tertinggal juga perlu untuk dikembangkan. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat (Dewi, 2012:2).

Di Indonesia ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan disebut Musyawarah Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Pasal 1 ayat (21) dinyatakan

bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan Musrenbang desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan (Arina, 2013:2).

Pada sisi yang lain, penyelenggaraan musrenbang desa seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Bahkan musrenbang desa sering kali menjadi forum yang tidak bersahabat bagi wargamasyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Beberapa penyebab dan kendala yang dapat diidentifikasi antara lain: tidak cakupnya fasilitator untuk memandu forum-forum perencanaan partisipatif dan inklusif, metodologi yang tidak sesuai, kurang kesediaan media bantu, dan kurangnya kapasitas lembaga penyelenggara.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*). Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Musrenbang merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top Down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government*

stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Musrenbang desa merupakan forum tahunan yang diadakan oleh Pemerintah desa untuk merancang program-program pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Program pembangunan yang akan dicanangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes Kabupaten dan jumlah APBDes dimana salah satu sumber terbesar dari APBDes tersebut berasal dari bantuan keuangan Kabupaten yang biasa disebut Alokasi Dana Desa. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis. Istilah Musyawarah sebenarnya sudah jelas menggambarkan tentang forum yang didalamnya ada perumusan suatu rencana dan berakhir pada pengambilan keputusan secara mufakat bukan sebagai suatu acara seminar atau sosialisasi informasi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menganut pendekatan *bottom-up* harus melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagai sebuah proses yang melibatkan kepentingan orang banyak, seharusnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) juga memperhatikan partisipasi masyarakat. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan kata partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh, menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi satu dengan lainnya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan erat kaitannya dengan usaha membangkitkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti kesediaan untuk

membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berarti juga keterlibatan seseorang pada bagian kegiatan bersama. Pengertian partisipasi dalam pembangunan berarti keterlibatan individu atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Desa Tanjung Pinang I merupakan desa yang terletak di kawasan Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung. Pinang I ini tercatat jumlah penduduk 1890 jiwa, yang terbagi dan tersebar dalam 4 dusun dan 8 RT. Desa ini salah satu desa di Kecamatan Tanjung Batu yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam forum musrenbang desa setiap tahunnya. Desa Tanjung Pinang I sudah menjalani proses perencanaan pembangunan sejak tahun 2005 (data profil desa Tanjung. Pinang I). pelaksanaan Musrenbang Desa merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Desa guna menciptakan pemerintahan yang transparan. di Desa Tanjung Pinang I juga dilakukan Musren RT/RW. Musren RT/RW dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat akar rumput. Aspirasi dari masyarakat yang telah diperoleh nantinya akan dibawa ke musrenbang dusun untuk disusun menjadi prioritas program. Prioritas program yang nantinya disepakati diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu program fisik dan non-fisik. Program fisik berkaitan dengan program infrastruktur, sementara program non-fisik meliputi program-program pemberdayaan atau yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

Tidak hanya prioritas program saja, musrenbang dusun juga dilaksanakan untuk menyepakati masalah anggaran program pembangunan. anggaran program pembangunan yang dimaksud meliputi alokasi dana pembangunan, sumber dana pembangunan dan estimasi jumlah bantuan yang diperoleh baik dari proposal maupun swadaya masyarakat. setelah semua prioritas program dan anggaran program disepakati maka di dokumentasikan dalam bentuk proposal pembangunan.

Dokumen proposal pembangunan yang telah disepakati di Musrenbang dusun selanjutnya dibawa ke dalam Musrenbang Desa untuk disepakati bersama.

Peserta Musrenbang Desa merupakan perwakilan dari dusun dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, masyarakat yang akan bermusyawarah, bersama desa dan LPMD untuk menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa merupakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun, sementara RKP merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam rentang waktu satutahun.

Dalam teorinya salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Musrenbang desa ini adalah partisipasi masyarakat yakni perencanaan dari bawah ke atas (*battom up*) secara aktif. Maka dalam pengajuan usulan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa haruslah tinggi. Kenyataannya dari tahun ketahun dalam Musrenbang desa yang di laksanakan pemerintahan desa Tanjung Pinang I mengalami penurunan peserta dalam menghadiri Musrenbang desa yang di laksanakan pemerintahan desa Tanjung pinang I. Untuk melihat partisipasi masyarakat yang hadir dalam Musrenbang desa dari tahun ke tahun yang telah di laksanakan pemerintahan desa Tanjung pinang I, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Jumlah Peserta yang Mengikuti Musyawarah

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Peserta	66	58	47	39	30

(Sumber : Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Tanjung Pinang I ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa semakin menurun dan hasil dari Musrenbang desa tersebut tidak dapat mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat.

Kurangnya partisipasi atau menurunnya partisipasi masyarakat tersebut di khawatirkan akan menyebabkan pelaksanaan program dalam perencanaan

pembangunan ini akan terhambat dan mengancam keberhasilan pembangunan yang maksimal. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan program perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya partisipasi elemen-elemen pendukung program tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah yang kompleks, dimana banyak terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang tersebut mendukung atau tidak mendukung suatu program.

Kemudian juga Dilihat dari kondisi riil sementara tentang aparat Desa Tanjung Pinang I. Menurut pengamatan menunjukkan bahwa kurangnya peranan Kepala Desa selaku aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama untuk menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Seperti halnya, pemerintah desa akan mengadakan rapat atau musrenbang mengenai perencanaan Pelatihan Kelompok kerja pengerajin pandai besi yang akan diadakan dibalai desa. Namun, informasi yang diberikan kepada ketua RT masing-masing masih sangat kurang jelas dan tidak pasti. Sehingga, masyarakat desa merasa informasi tersebut belum tentu pasti adanya dan membuat masyarakat enggan untuk mengikuti rapat tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Masih lemahnya peranan pemerintah desa untuk mengajak atau menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Maka disini terlihat bahwa, lemahnya peran dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan dilapangan. Menunjukkan bahwa kurangnya peranan pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut.

Dengan demikian dalam penelitian ini mengapa penting untuk diteliti, untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musrenbang desa , maka di perlukan kajian lebih mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

pada musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Tanjung pinang I, Kecamatan Tanjung batu, Kabupaten Ogan Ilir ini. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, berdasarkan gejala-gejala yang muncul masalah ini menarik untuk dikaji karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa. Keterlibatan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam menentukan tingkat keberhasilan Musrenbang desa perencanaan dari bawah ke atas (*battom up*) secara aktif.

Dalam rangka untuk memastikan bahwa masyarakat telah berperan sebagai pihak yang menyusun rencana pembangunan maka perlu adanya suatu kajian. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Tanjung Pinang I dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musrenbang desa?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam menyelenggarakan musrenbang desa di Desa Tanjung Pinang I, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.

1.3.2 Tujuan khusus

- a. Untuk memahami bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa.
- b. Untuk memahami Kendala apa yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musrenbang desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritik di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu- ilmu sosial terutama di bidang perencanaan sosial dan sosiologi pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat mengeluarkan peraturan atau kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Creswell, jhon w. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Danim, S. 2001. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka
- Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung : Studie Driya Media
- Fiker. 2010. “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Desa di Desa Lodaya Kecamatan Randungdongkal Kabupaten Pemalang*”.
- Hariyadi, Amad. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Silae Kecamatan UluJadi Kotapalu*. Jurnal Katalogis VOL. 4 No. 3 :168 – 180
- Idrus. 2007. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PTErlangga.
- Moleong, L. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaPosdakarya.
- Narbuko, C dan Achmadi A. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosilogi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastropetro, Novia, dkk. 2011. *Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang: Paper Kajian Kebijakan-KebijakanTerkait*. Jakarta
- Seokanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers
Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Sarwono, SarlitoWirawan. 2002. *Teori-teoriPsikologiSosial*. Jakarta. PT. Rajawali Pers.

Sumber Jurnal Dan Internet

Ibory Anthonius. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni*. Jurnalgovernance Volume 5 No. 1

(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view> diakses pada 15 Oktober 2016).

Motte, Joseph, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*, (Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang: thesis tidak diterbitkan,2005)

Supadmi, U. S. 2013. *Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau*.Jurnal Tesis PMIS UNTAN , 1-13.

Satries WI. 2011. *Mengukur tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*. J Kybernan.di akses pada 12 Oktober 2016)

Purnamasari, Novia, dkk. 2011. *Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang* : Paper Kajian Kebijakan-Kebijakan Terkait. Jakarta

T. Coser dan Anthony Rosenberg. 1976. *An Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall

Web.paulsinlaeloe.blogspot.co.id/2010/12/musrenbang-desa. Di akses 22 Jan 2017.

Web.kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PanduanMusrenbang/Musrenbang_Desa.Di akses 22 Jan 2017.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Desa Nomor 1 tentang APB-Desa Peraturan Desa Nomor 2 tentang Review RPJM-Desa

(PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada Bab III Pasal 3, 4 dan 5

(PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Musyawarah Perencanaan pembangunan BAB VIII peran lembaga-lembaga dalam musrenbang desa pasal 9